SKRIPSI

KOORDINASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Syanur Pitrianti
NIM. E.1031181003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

KOORDINASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Syanur Pitrianti
NIM. E.1031181003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

KOORDINASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Syanur Pitrianti
NIM.E.1031181003

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Tanggal: 24/7/2025

Dosen Pembimbing Pedamping

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Tanggal: 28/07/2025

HALAMAN PENGESAHAN

KOORDINASI PEMERINTAH KOTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Oleh:

Syanur Pitrianti
NIM. E.1031181003

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Sidang (3) Fisip Untan

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulius Yohanes, M.Si	Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 196405271992021001	NIP. 198805072014041002
Penguji Utama	**Penguji Pedamping**
Dr. Isdairi, M.Si	Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 196402181990021001	NIP. 198306272006042020

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Syanur Pitrianti: Koordinasi Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2025.

Penelitian ini dilakukan karena munculnya fenomena meningkatnya PKL di Kawasan Untan. Meningkatnya jumlah PKL diperlukannya koordinasi dengan Pemerintah Kota yang dalam Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan Satpol PP kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu 4 indikator koordinasi menurut Hasibuan (2016, 88) yaitu, kesatuan Tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan Disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah kota *pertama*, kesatuan tindakan masih belum berjalan dengan optimal, kurangnya usaha dari pihak yang terlibat dalam koordinasi untuk menyatukan tindakan dan keselarasan pemikiran suatu tindakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. *Kedua*, komunikasi, adanya perbedaan pemahaman dalam komunikasi antara Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dengan Untan dalam penentuan relokasi pedagang kaki lima yang berakibat tidak adanya kelanjutan dalam komunikasi koodinasi ini. *Ketiga*, pembagian kerja pada setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki pada setiap organisasi, memiliki struktur organisasi yang jelas dan berpedoman pada peraturan daerah, sehingga pembagian kerja dalam koordinasi ini sudah jelas. *Keempat*, disiplin pada setiap anggota di perangkat daerah yang terlibat dalam koordinasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan SOP di setiap organisasinya. Pemerintah kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Satpol PP dan Untan diharapkan untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan lebih optimal.

Kata Kunci : Koodinasi, Penataan, PKL, Untan

ABSTRACT

Syanur Pitrianti: Coordination of the City Government in the Arrangement of Street Vendors in the Universitas Tanjungpura Pontianak Area. Undergraduate Thesis. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura. Pontianak, 2025.

This research was conducted due to the phenomenon of the increasing number of street vendors (PKL) in the Universitas Tanjungpura (Untan) area. The rise in street vendors makes coordination with the City Government essential. According to Pontianak City Regional Regulation No. 11 of 2022, this coordination is carried out by the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade of Pontianak City and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Pontianak City. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. The theoretical framework used four coordination indicators from Hasibuan (2016, p. 88), namely unity of action, communication, division of labor, and discipline. The findings revealed several aspects of city government coordination. First, unity of action has not run optimally, as the parties involved have made limited efforts to unify actions and align perspectives in order to achieve planned outcomes. Second, there were misunderstandings in communication between the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade and Untan, particularly regarding the relocation of street vendors, which resulted in a lack of follow-up communication. Third, the division of labor in each institution followed their respective main duties, with a clear organizational structure and adherence to regional regulations, making the division of labor in this coordination well-defined. Fourth, discipline was reflected in the compliance of each institution with applicable rules and norms. Employees of the involved institutions perform well in accordance with the regulations and SOPs of their respective organizations. The city government, through the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade, Satpol PP, and Untan, is expected to implement and supervise the arrangement of street vendors in the Universitas Tanjungpura Pontianak area.

Keywords: Coordination, Arrangement, Street Vendors, Untan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Koordinasi Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai lokasi yang digunakan pedagang kaki lima yang masuk dalam Kawasan pendidikan Universitas Tanjungpura, dan kurang efektifnya koordinasi yang terlaksana antara pemerinta kota melalui Dinas Koperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam menegaskan loasi-lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima. Identifikasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah indikator-indikator yang mempengaruhi koordinasi dalam penataan pedagang kaki lima, sedangkan rumusan masalahnya adalah "Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak?". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang koordinasi pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. peneliti menggunakan teori indikator koordinasi menurut Hasibuan (2016,88) yaitu indikator-indikator dalam koordinasi yang efektif ada 4 macam yaitu, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. *pertama*, indikator kesatuan tindakan dalam koordinasi pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak masih belum optimal. Adanya hambatan dari luar berdampak pada terganggunya koordinasi. *Kedua*, indikator Komunikasi yang terjadi dirasa tidak efektif karena tidak adanya keberlanjutan dari diskusi dan rapat mengenai

perkembangan tugas penataan pedagang kaki lima yang terdapat di Kawasan Universitas Tanjungpura antar organisasi perangkat daerah. Komunikasi yang terjadi dirasa tidak efektif karena tidak ada laporan mengenai perkembangan tugas penataan PKL, tidak adanya feedback informasi perkembangan dalam penataan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan untuk lanjut berkoordinasi. Adanya komunikasi yang tidak intensif dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dengan Untan karena berakhirnya MoU, namun saat masih berjalannya MoU tidak adanya perubahan. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban terhadap penataan pedagang kaki lima.

Ketiga, indikator pembagian kerja problematika dari perdagang kaki lima di Untan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi usaha Mikro dan perdagangan Kota Pontianak dalam merelokasi mereka ketempat yang khusus diperuntukan untuk mereka. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sudah membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas berdasarkan fungsi dan keahlian, begitu juga dengan Satpol PP. Hambatan dan keterbatasan dalam pembagian kerja, salah satu hambatan adalah keterbatasan waktu, kemampuan serta menjaga keseimbangan beban kerja pada setiap tim. *Keempat,* indikator disiplin dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Untan hanya diterapkan untuk perangkat daerah dan tim dalam koordinasi tersebut. Pedagang kaki lima dinilai kurang dalam menerapkan indikator disiplin .disiplin merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penataan pedagang kaki lima . disiplin tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup

kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas, etika kerja, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas

Saran yang dapat disampaikan yaitu *pertama*, Kesatuan tindakan, dalam Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan untuk lebih memperhatikan proses selama melakukan penataan dari pendataan pedagang kaki lima, salah satunya lebih merutinkan pertemuan sehingga tidak terdapat kesalahpahaman dalam kesatuan tindakan menentukan lokasi yang tepat untuk relokasi pedagang kaki lima. *Kedua,* komunikasi yang rutin dapat terjaga antara Universitas Tanjungpura dengan perangkat daerah dan pedagang kaki lima sehingga dapat mempertimbangkan potensi ekonomi dari keberadaan pedagang kaki lima. *Ketiga,* Pembagian kerja, dapat membuat kebijakan yang lebih khusus dalam pembagian kerja pada koordinasi ini, agar lebih terfokuskan tanggung jawabnya, sehingga dapat mengatasi hambatan yang datang dari keterbatasan waktu dan kemampuan serta dapat menjaga keseimbangan beban kerja. *Keempat,* Disipin dalam diri PKL lebih ditanamkan dan dibiasakan dalam bekegiatan jualan dan lebih disiplin dalam menaati peraturan dalam suatu Kawasan yang digunakan sebagai tempat jualan, sehingga lokasi yang digunakan tetap terjaga kebersihan, keindahan dan tidak menghilangkan fungsi umumnya. Sedangkan Satpol PP lebih meningkatkan ketegasan dalam penertiban dan dapat membuat kebijakan hukum yang membuat efek jera terhadap Pedagang kaki lima yang masih melanggar

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Syanur Pitrianti

Nomor Mahasiswa : E1031181003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan sayadaam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau instansi lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 18 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Syanur Pitrianti

NIM.E1031181003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. AL-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Syakrani dan Ibu Nurseha yang selalu memberikan motivasi baik berupa materi dan semangat serta mengingatkan untuk perkulihan saya.
2. Ketiga saudara abang Haris, dan adek Sopia Jeti dan Raga Saputra, yang turut serta memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan perkulihan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Koordinasi Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terlibat yang telah memberikan doa, motivasi, saran dan bimbingan serta bantuan yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaian rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan selaku dosen pembimbing pedamping.
4. Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Isdairi, M.AB dan Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku dosen penguji dalam skripsi ini
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Satpol PP Kota Pontianak dan Wakil Rektor IV Untan yang telah membantu dan memberikan data dan waktu dalam penelitian saya.
8. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan beserta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
9. Kedua orang tua, saudara, keluarga besar dan teman-teman yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis tanpa henti.
10. Comdev Outreaching Untan dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti yang telah memberikan Beasiswa Bidikmisi penuh selama delapan semester (4 tahun) masa kuliah

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allat SWT, dan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup bearti bagi kita semua yang memerlukannya Aamiin.

Pontianak, 18 Mei 2025



Syanur Pitrianti
NIM.E1031181003

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 8
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Definisi konsep 11
2.1.1 Konsep Koordinasi 11
2.1.2 Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL) 15
2.1.3 Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 20
2.2 Teori 21
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 23
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Asumsi/Pertanyaan Penelitian 27

BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3.1 Lokasi Penelitian 29

3.3.2 Waktu Penelitian 30
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 32
3.4.1 Subyek Penelitian 32
3.4.2 Obyek Penelitian 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 35
3.7 Analisis Data 36
3.7.1 Keabsahan Data 36
3.7.2 Teknik Analisis Data 37

BAB IV GAMBARAN UMUM dan LOKASI PENELITIAN 40
4.1 Deskripsi Lokasi 40
4.1.1 Gambaran Umum Universitas Tanjungpura Pontianak ... 40
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 48
4.1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontinak 51
4.1.4 Gambaran Pedagang Kaki Lima Di Untan 54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 64
5.2 Analisis 65
5.2.1 Kesatuan Tindakan 65
5.2.2 Komunikasi 70
5.2.3 Pembagian Kerja 75
5.2.4 Disiplin 80

BAB VI PENUTUP 85
6.1 Kesimpulan 85
6.2 Saran 87
6.3 Keterbatasan Penelitian 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Jalan Moh.Isja Dan Daya Nasional Pada Oktober 2024 2

3.1 Waktu Penelitian 31

4.1 Jumlah PKL 11 Agustus Di Jalan Moh. Isja 57

4.2 Jumlah PKL 11 Agustus DI Jalan Daya Nasional 61

5.1 Pembagian kerja dalam Koordinasi Penataan PKL 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1.1 Gambar Gerobak dan Tenda PKL 4
2.1 Alur Pikir Penelitian 26
4.1 Peta Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak 41
4.2 Logo Untan 42
4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 50
4.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 53
4.5 Peta Wilayah Sebaran PKL 54
4.6 Jenis Jualan PKL 55
4.7 Gerai Kewirausahaan dan UMKM Untan 56
5.1 Pertemuan Pertama Pemerintah Kota, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, dengan Untan 67
5.2 Surat Pemberitahuan Pengosongan 74
5.3 Pelaksanaan Pendataan PKL Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 94

Lampiran 2 Profil Informan 98

Lampiran 3 Pedoman Observasi 101

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 102

Lampiran 5 MoU Pemerintah Kota dan Untan 106

Lampiran 6 Surat Tugas Penelitian 108

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup 109

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi informal merupakan kegiatan berdagang dari perekonomian mikro yang banyak dilakukan oleh masyarakat di kota-kota besar dan kegiatan usahanya melebihi kegiatan usaha di sektor formal, contohnya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberikan dampak terhadap kegiatan masyarakat, baik itu positif atau negatif. Apabila dilihat dari dampak positif, munculnya pedagang kaki lima dapat memberikan kontribusi dan menyumbang peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama dari masyarakat menengah kebawah yang signifikan mengurangi permasalahan tentang pengangguran dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat menengah kebawah di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima juga dapat membantu masyarakat yang berada di kawasan tersebut menjadi lebih mudah untuk mencari kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau. Namun jika dilihat dari sisi negatifnya, munculnya pedagang kaki lima di pinggiran jalan akan mengganggu kegiatan lalu lintas jalan dan juga mengganggu bagi para pejalan kaki di lokasi tersebut. Terutama di lokasi jalan yang kecil dan juga mengganggu pejalan kaki yang menggunakan trotoar, dan juga lokasi yang digunakan berdagang akan terlihat tidak rapi membuat kawasan kota tersebut menjadi tidak indah dan tidak bersih serta menciptakan buruknya tata kota.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Gebernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sehingga

melalui penataan lokasi binaan dapat melakukan penertiban dan pemindahan PKL dapat menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usaha terhadap PKL yang berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Peraturan daerah tersebut menjadi landasan dengan memperhatikan kondisi lingkungan tempat berjualan pedagang kaki lima yang banyak berlokasi ditempat yang tidak diperuntukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Pedagang kaki lima selalu memilih lokasi yang dianggap strategis untuk memulai usaha meskipun lokasi tersebut merupakan Kawasan Pendidikan. Demikian halnya dengan pedagang kaki lima yang ada di kedua jalan Moh. Isja dan Daya Nasional yang termasuk dalam Kawasan Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, keberadaan pedagang kaki lima mengalami peningkatan pertumbuhan sejak dibenahinya taman sepeda Universitas Tanjunpura.

Table 1.1

Jumlah pedagang kaki lima di Jalan Moh. Isja dan Daya Nasional Pada Oktober 2024

No	Jalan	Hari						
		Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1.	Moh. Isja	100	100	114	90	115	118	118
2.	Daya Nasional	72	78	83	73	83	92	94
Jumlah		**172**	**178**	**197**	**163**	**198**	**210**	**212**

Sumber: observasi penulis 2024

Tabel diatas berdasarkan observasi penulis pada bulan Oktober 2024 di Jalan Moh. Isja dan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara yang berjumlah 212 pedagang kaki lima rata-rata dalam setiap harinya yang kebanyakan para pedagang

kaki lima jual adalah makanan dan minuman olahan. Jalan Moh. Isja merupakan ruas jalan yang menghubungkan jalan Ayani dan Daya Nasional, dan juga jalan yang berdekatan dengan taman sepeda, taman digulis dan auditorium Untan. Sehingga jalan Moh. Isja tempat yang strategis dalam berdagang dan jumlah pedagang kaki lima di jalan ini lebih banyak dari jalan Daya Nasional yaitu 118 pedagang kaki lima dalam satu hari libur. Sedangkan pada Jalan Daya Nasional merupakan ruas jalan yang menghubungkan jalan Ayani dan jalan Imam Bonjol. Di jalan ini pedagang kaki lima hanya berdagang pada ruas jalan sebelah kiri menuju jalan Imam Bonjol yang rata-rata berjumlah 94 pedagang kaki lima dalam satu hari libur. Kegiatan pedagang kaki lima pada kedua jalan tersebut lebih ramai pada hari-hari libur, hal ini disebabkan banyak pembeli yang berkunjung dan bersantai di taman-taman yang berdekatan dengan kedua jalan.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa aktivitas pedagang kaki lima yang ada di jalan Moh. Isja dan sepanjang jalan Daya Nasional yang dimana daerah tersebut termasuk kedalam Kawasan Pendidikan Universitas Tanjungpura, terbilang strategis sebab lokasi berjualan berada dekat Kawasan pendidikan, kost-kostan dan taman-taman pusat kota berada pada aksesibilitas yang tinggi sehingga memberi suatu kemudahan terjadinya transaksi dengan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mc. Gee dan Yeung (Sulistyo 2006, 57) yang menyatakan bahwa "Aktivitas pedagang kaki lima terpusat pada lokasi yang merupakan simpul dari jalan-jalan atau tempat yang sering kali orang-orang kunjungi dan berdekatan dengan kawasan fungsional kota". Pedagang kaki lima akan berusaha mencari kemudahan untuk terjadi hubungan antara penjual dan pembeli, sehingga pedagang

kaki lima lebih memilih berjualan pada sejumlah lokasi seperti trotoar, seperti trotoar dan saluran drainase jalan di jalan Moh. Isja dan Daya Nasional. Pedagang kaki lima yang memenuhi pinggir jalan (trotoar), dimana pinggir jalan atau trotoar tersebut seharusnya digunakan oleh pejalan kaki dan tempat pemberhentian sementara (selter) bagi pengguna jalan. Selain memenuhi pinggir jalan (trotoar), pedagang kaki lima juga berjualan diatas saluran drainase jalan di depan taman sepeda dan banyak pedagang kaki lima yang meninggalkan peralatan usahanya seperti gerobak, meja, tenda dan kayu yang menutupi saluran drainase jalan. Sehingga membuat Kawasan Universitas Tanjungpura menjadi kurang tertata rapi dan kurang nyaman untuk dipandang.

Gambar 1.1

Gambar gerobak dan tenda PKL



Sumber: observasi penulis tahun 2023

Dilihat dari gambar tersebut bahwa lokasi tersebut bukan lokasi yang diperuntukan untuk berjualan atau menyimpan alat jualan, pihak Universitas Tanjungpura sudah memberi peringatan dengan menempelkan spanduk yang berisi larangan berjualan/mendirikan bangunan dan menyimpan barang dilingkungan Universitas Tanjungpura. Namun pedagang kaki lima tidak mengindahkan peringatan tersebut dan masih banyak pedagang kaki lima yang membiarkan begitu saja gerobak dan meja jualan mereka di tepi jalan dan ada juga yang menyimpan peralatan jualan meraka di gedung-gedung milik Universitas Tanjungpura. Pedagang kaki lima yang tidak sedikit membuang sampah produksinya di tempat sampah milik Universitas Tanjungpura yang dimana kapasitas tempat sampahnya kecil sehingga banyak sampah yang berserakan. Dampak negatif ini akan berdampak pada terjadi penggusuran pedagang kaki lima dan penggusuran pemindahan lokasi penyimpanan peralatan usaha pedagang kaki lima

Fenomena ini juga tidak terlepas dari mitigasi Kerjasama antara Pemerintah kota dengan Universitas Tanjungpura tentang pengembangan pada bidang pendayagunaan sarana taman sepeda dan digulis yang tertuang dalam MoU Nomor 9.1/SP-III/2021 atau Nomor 2907/UN22/KS/2021, oleh karena itu demi mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 akibat mitigasi Kerjasama tersebut, pihak Universitas Tanjungpura berhak melarang dan menertibkan pedagang kaki lima yang sembarangan dan tidak mengindahkan tata ruang yang ada di Kawasan Universitas Tanjungpura yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kota Pontianak. Menurut Handoko (2011, 195)

“Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang funsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah peranan koordinasi yang baik dalam penyatuan tujuan dan kegiatan dari masing-masing satuan bidang yang berbeda suatu organisasi sangat berdampak pada hasil yang ingin dicapai. Koordinasi dalam suatu lembaga pemerintahan daerah/kota juga dapat dilakuan secara dua arah, baik koordinasi secara vertikal maupun secara horizontal.

Dimana pemeritah kota Pontianak melalui dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan melakukan koordinasi di bidang perdagangan dan usaha kecil menengah dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan usaha kecil menengah. Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan dengan cara pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, serta peremajaan lokasi pedagang kaki lima pada lokasi binaan

Tanggal 10 Juni 2022 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Potianak menggusur pedagang kaki lima di kawasan jalan Daya Nasional dan Moh. Isja (Hi Pontianak, 2022). Penertiban ini dilakukan oeh Satpol PP, TNI dan Polri yang berdasarkan dari surat yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Tanjungpura untuk penertiban dan penataan Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada saat dilakukan penertiban terjadi penolakan dari pedagang kaki lima yang tidak ingin lapaknya digusur. Salah satu dari pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan tersebut menegaskan bahwa yang dikutip dari Hi Pontianak (Erma,2022):

> “Ada taman, ada pedagang,ada pengunjung yang membeli. Kalau taman tidak dikembangkan, gimana masyarakat mau pergi hiburan. Perjuangkan lahan jualan kami, kami hanya untuk makan dan sekolahkan anak kami. Kemungkinan ada anak kami yang kuliah di Untan, dan ada juga pedagang kita yang lulusan Untan. Tidak ada retribusi pembayaran, kami hanya bayar listrik, sampah kita buang di tempatnya. Makanya kalau dari Untan akan menertibkan terkait waktu, turun jualan dan tutup jualan, itukan penertiban, artinya ada solusi. Kalau penggusuran, itukan tidak layak, kami akan tetap jualan. Kalau ini dijadikan lahan sewa dari pemerintah, kami tetap bayar, kalau dari preman tidak akan bayar. Kami mohon kepada Pak Edi Kamtono gerakan untuk pada pedagang. Ada lebih dari 100 pedagang disini, kami mohon Pak Edi Kamtono dukunglah kami untuk jualan di taman ini.”

Penggusuran tersebut menghasilkan mediasi antar Satpol PP dan pihak Universitas tanjungpura sehingga selama tiga hari pedagang kaki lima di jalan tersebut dilarang berjualan sementara. Namun sejak dari mediasi tersebut Kawasan Universitas Tanjungpura terlihat masih kumuh dan masih banyak gerobak atau tenda pedagang yang tidak di bawa pulang. Koordinasi yang terlaksana pada tanggal tersebut menjadi indikator masih belum sinkronnya kesatuan tindakan antara pemerintah kota melalui dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam mempertegaskan lokasi-lokasi yang diperuntukan untuk pedagang kaki lima. Penyampaian tindakan tersebut dapat terjalin dengan komunikasi yang intensif agar pedagang kaki lima dapat mematuhi peraturan yang ada. Sehinga dalam komunikasi tersebut dapat terbentuk pembagian tugas dan disiplin yang jelas di antar anggota yang berkewajiban dalam menangani penataan pedagang kaki lima yang ada. Dinas kooperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada keempat indikator koordinasi tersebut agar lebih mudah mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan. Fenomena inilah yang menarik minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut dalam mengetahui bagaimana koordinasi

Pemerintah Kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah adalah fokus dari masalah obyek penelitian yang dilakukan dengan tahap awal, yaitu melakukan studi pendahuluan ke obyek penelitian melalui observasi awal dan wawancara ke berbagai sumber (Sugiyono 2023, 281). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator – indikator yang mempengaruhi koordinasi dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura.
2. Kesadaran dari pedagang kaki lima yang masih kurang dalam menaati Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Batasan masalah dari obyek penelitian yang disebabkan adanya keterbatasan tenaga, dana dan waktu dari peneliti, maka peneliti tidak melakukan penelitian pada semua obyek penelitian tetapi perlu melakukan fokus. Fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan (Sugiyono 2023, 290). Fokus dalam penelitian ini adalah melihat indikator-indikator penerapan koordinasi pada pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.4. Rumusan Masalah

Menurut Arikunto (2019, 89) “Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara merumuskan judul selengkapnya. Walaupun tampak masalah sudah dituangkan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkan dengan arti yang berbeda-beda dari apa yang dimaksudkan peneliti.” Penulis harus mampu untuk perumusan masalah bertujuan agar maksud penulis dan pembaca sama. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana koordinasi pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak ?

1.5. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (2019, 97) “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian berakhir.” Artinya penelitian dilakukan untuk sesuatu yang akan dituju. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang koordinasi pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2023) “manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, agar mendapatkan pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan kedalam topik penelitian.” Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik secara khusus untuk perkembangan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan bisa dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Pontianak, dapat memberikan masukan terhadap pemerintah kota Pontianak agar lebih mengoptimalkan koordinasi dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura.
b. Bagi Masyarakat, meningkatkan koordinasi dalam komunikasi antara masyarakat, khususnya pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota dalam memberikan kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kota untuk meningktakan koordnasi yang baik.
c. Bagi Peneliti, sebagai bahan serta pertimbangan penelitian terutama di bidang ilmu pemerintahan. Sebagai pengetahuan baru tentang pentingnya koordinasi pemerintah kota dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Tanjungpura.